

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat serius dan selalu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah di setiap negara berkembang maupun negara maju. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang berjuang untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, termaksud wilayah-wilayah didalamnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2021) kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Kemiskinan bagi masyarakat miskin adalah sebuah kenyataan yang selalu dialami dalam kehidupannya setiap hari, dikarenakan oleh apa yang dirasakan mereka selama menjalani hidup dan membandingkannya dengan orang lain yang tingkat kehidupan sosialnya jauh diatas mereka (Sari, 2021).

Terdapat dua jenis kemiskinan menurut Arsyad (2010) yaitu Pertama, kemiskinan Absolut adalah kemiskinan yang mendefinisikan tentang tingkat pendapatan, maupun pemenuhan kebutuhan pribadi dan sosial untuk menjamin kelangsungan hidup, sedangkan Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa kemiskinan absolut sebagai sebuah situasi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pada umumnya. Kedua, kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan yang terpengaruh dari tinggi rendahnya tingkat kemiskinan yang ditentukan oleh lingkungan. Jika semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan miskin. Masyarakat dapat dikatakan

miskin saat hasil rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan kurang (dibawah) dari batas garis kemiskinan yang telah ditentukan (BPS, 2021).

Menurut Noor, Haryatiningsih dan Sundaya (2017) menyatakan bahwa persentase penduduk di Indonesia disetiap wilayah berbeda, penyebabnya karena terdapat beberapa faktor ekonomi maupun non ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang rendah, lapangan kerja yang terbatas, keterbatasan modal dan pendidikan yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Untuk menghadapi permasalahan kemiskinan ini pemerintah perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah serta tujuan pemerintah dan dibagi menurut waktunya, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bukan hanya untuk wilayah yang telah maju namun juga wilayah-wilayah terbelakang atau yang masih berkembang. Hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan ketimpangan atau tidak meratanya perekonomian dan dapat memenuhi kesejahteraan umum masyarakat.

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia bagian timur yang memiliki tingkat kemiskinan tergolong cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin provinsi Maluku dengan hasil rata-rata adalah sebesar 18,17%, dimana angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan nasional yaitu 10,10%. Provinsi Maluku terdiri dari 12 Kabupaten/Kota didalamnya yaitu Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Bruru, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Ambon, Tual, dan Maluku. Sensus penduduk provinsi Maluku pada tahun 2020 tercatat jumlah penduduknya

sebanyak 1.831.880 jiwa. Penyebaran penduduk terbanyak didominasi oleh Kota Ambon dengan jumlah penduduk sebesar 495.474 jiwa, sedangkan daerah yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit yaitu 64.178 jiwa bertempat di Kabupaten Buru selatan (BPS, 2020). Penyebaran penduduk yang tidak merata ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian terjadi secara tidak merata di wilayah Provinsi Maluku. Oleh karena itu banyak masyarakat dari daerah-daerah terpencil memutuskan untuk pindah ke Kota Ambon karena melihat aktivitas perekonomian disana jauh lebih tinggi/maju dan berkemungkinan bisa memberi penghasilan yang lebih tinggi. Jika hal ini terus terjadi, maka ketimpangan perekonomian antara Ambon dengan daerah lainnya akan semakin tinggi, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab masalah kemiskinan yang ada di provinsi Maluku. Berikut ini adalah persentase penduduk miskin 12 Kabupaten/Kota di provinsi Maluku dari tahun 2016-2020.



Gambar 1.1: Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku (%).

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2021

Data persentase jumlah penduduk miskin 12 Kabupaten/Kota di provinsi Maluku menunjukkan dari tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif dimana jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu Maluku Barat Daya dengan rata-rata penduduk miskin sebesar 29,99% dan jumlah penduduk miskin terendah adalah Ambon dengan rata-rata penduduk miskin sebesar 4,58%.

Proses terintegrasinya era kolonialisme dan pasca kolonialisme Indonesia Bagian Timur, khususnya Kepulauan Maluku ke dalam jaringan portugis dan Spanyol di kepulauan tersebut pada awal abad ke-16. Di sebabkan oleh kekayaan kepulauan tersebut akan rempah-rempah sehingga menarik kaum kolonial ke pulau (Tjokrowinoto, 1996). Sektor unggulan provinsi Maluku terdiri dari kehutanan, kelautan dan perikanan, serta pertanian. Potensi ini memberi harapan agar dapat diberdayakan secara maksimal sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian wilayah. Sebagai daerah kepulauan Maluku memerlukan fasilitas infrastruktur yang memadai sebagai mobilitas untuk menjangkau satu daerah ke daerah lainnya. Biaya hidup serta akses yang cenderung mahal dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga membatasi ruang gerak masyarakat dan menjadi hambatan untuk maju dan berkembang. Oleh karena itu pemerintah pusat berupaya untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan cara membuat program-program kerja untuk memajukan perekonomian dan menanggulangi kemiskinan.

Pemerintah daerah provinsi Maluku juga ikut serta dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Maluku sendiri. Melalui salah satu kebijakan yang diambil yaitu Keputusan Gubernur Maluku No.142 tahun 2002 telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Provinsi Maluku. Pembentukan KPK ini bertujuan sebagai wadah koordinasi kebijakan dan program-program

penanggulangan kemiskinan (PERDA Provinsi Maluku, 2002). Program lainnya adalah Kebijakan Fiskal Regional Provinsi Maluku tentang rencana kerja pemerintah daerah, dimana upaya pemantapan kualitas pembangunan dari misi sebelumnya pada tahun 2004-2019 menjelaskan perihal akses pendidikan, pengelolaan SDA dan SDM, investasi, kesehatan, serta transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Maluku (Kemenkeu, 2020). Program ini belum seutuhnya dirasakan oleh masyarakat, disebabkan jangkauan yang belum mencapai ke seluruh daerah hingga keseluruhan lapisan masyarakat. Kemenkeu (2020) menuliskan bahwa lapangan pekerjaan utama masyarakat di provinsi Maluku sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian yang kedua, lapangan usaha terbesar yaitu pedagang besar dan eceran.

Selain pemerintah, terdapat program dari pihak lainnya seperti Yayasan Sauwa Sejahtera (YASTRA) dibentuk oleh Kotamadya Ambon pada 21 mei 1999, bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan masyarakat miskin yang mempunyai masalah di daerah Maluku. YASTRA Memutuskan untuk bekerja sama dengan Kedutaan besar Australia melalui dana yang dinamakan Direct Aid Program (DAP). DAP sendiri memiliki tujuan utama, yaitu dirancang untuk membantu masyarakat meningkatkan standar hidup mereka. Keputusan kerja sama yang diambil oleh YASTRA adalah bentuk upaya dalam membantu masyarakat pesisir (perikanan) yang berada di Pulau Seram bagian barat dengan bantuan melalui pemberian peralatan dasar alat tangkap tradisional (rumpon) di desa Sanahu (Saputra, 2018). Di daerah tersebut dominan dirasakan oleh para nelayan yaitu keterbatasan akses dan kurangnya modal melaut menjadi masalah

kemiskinan yang sulit diatasi, karena kurangnya pendapatan sementara modal yang telah dikeluarkan tidak kembali seutuhnya.

Peranan pemerintah untuk membuat kebijakan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan hal penting lainnya yaitu dapat menciptakan kesejahteraan hidup bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan jumlah agregat barang dan jasa bertambah yang dihasilkan masyarakat meningkat. Pengukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala provinsi atau kabupaten/kota (Suripto dan Subayil 2020).

Menurut Pangiuk (2018) pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bertambahnya pendapatan masyarakat secara menyeluruh di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Perhitungan pendapatan suatu wilayah pada mulanya dibuat dalam harga berlaku. Namun, untuk dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, maka harus dinyatakan dalam nilai riil, yang artinya dalam harga konstan. Pada penelitian Boy Sitompul memperoleh hasil penelitiannya yaitu, secara parsial PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Medan. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian Endar wati dan Arief Sadjiarto bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan perekonomian dapat berpengaruh menurunkan atau menaikkan tingkat kemiskinan. Berikut ini adalah

penjabaran data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di provinsi Maluku tahun 2016-2020.



Gambar 1.2: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Maluku (%).

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2021.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku dari tahun 2016-2020 dari segi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menunjukkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ditahun 2016 nilai PDRB ADHK adalah sebesar 5,73%, walaupun pada tahun-tahun berikutnya nilai PDRB provinsi Maluku mengalami peningkatan, akan tetapi berbeda di tahun 2019 nilainya turun menjadi 5,41% dan pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis hingga mencapai 0,92%. Jumlah rata-rata PDRB ADHK di provinsi Maluku bernilai sebesar 4,75%. Badan Pusat Statistik menuliskan bahwa sebagian besar penduduk provinsi Maluku berprofesi sebagai petani dan nelayan, hal ini ditunjukkan berdasarkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi penyumbang utama pada PDRB provinsi Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kesejahteraan nelayan dan petani terhadap PDRB dan indikator kesejahteraan hidup di Provinsi Maluku.

Perekonomian di provinsi Maluku sendiri masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendorong utama ekonomi daerah (Kemenkeu, 2020). Secara per kapita pertumbuhan di provinsi Maluku lebih kecil dari realisasi PDB per kapita Nasional dan PDRB per kapita Regional, dimana pada tahun 2020 PDRB per kapita provinsi Maluku sebesar Rp25,02 juta/tahun, lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp25,66 juta/tahun (turun sebesar -2,48%), sedangkan PDRB per kapita Nasional mengalami penurunan sebesar 3,35% dan PDRB per kapita Regional sebesar -11,58% (Kemenkeu, 2020).

Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di suatu daerah terkhususnya Provinsi Maluku juga yaitu kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM ini yang dapat menentukan bagaimana seseorang mempunyai kualitas tinggi untuk bekerja dan melakukan satu hal yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Cara untuk melihat kualitas SDM sendiri dapat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran dalam capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk (Andykha, Handayani dan Woyanti, 2018).

Saat kunjungan kerja reses komisi X DPR RI ke provinsi Maluku tahun sidang 2018-2019, tertulis Program Indonesia Pintar (PIP) yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Hal ini dilihat berdasarkan laporannya dalam identifikasi

masalah/data, bahwa dana PIP tidak berdampak signifikan terhadap upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di provinsi Maluku. Tantangan dibidang sosial kependudukan di provinsi Maluku adalah pembenahan dalam kualitas sumber daya manusia lokal. Dimana peningkatan kebutuhan tenaga kerja dengan bidang kerja yang semakin berkembang tidak diikuti dengan peningkatan skill tenaga kerja yang ada saat ini. Sebagian besar diantaranya tidak dapat memenuhi kriteria tenaga kerja dengan keahlian khusus (Kemenkeu, 2020).

Pendapat dari Suropto dan Subayil (2020), untuk mengukur IPM yaitu melalui angka kesehatan, pendidikan, pengeluaran perkapita atau daya beli masyarakat yang kemudian dihitung setiap satu tahun. Pada penelitian Ari Kristin Prasetyoningrum, U. Sulia Sukmawati hasil penelitiannya adalah IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di D.I.Yogyakarta. Penelitian lain yang memperoleh hasil yang sama yaitu pada penelitian Noor Muzdalifa, Ria Haryatiningsih dan Yuka Sundaya bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui indeks pembangunan manusia dapat berdampak bagi penurunan kemiskinan. Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.3: Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku (Indeks).

Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2021.

Jika dilihat dari penjabaran data diatas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Maluku dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai IPM yaitu sebesar 67,60%, dari tahun 2016 tersebut nilai IPM secara terus-menerus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 69,49%. Jumlah rata-rata IPM di provinsi Maluku adalah sebesar 68,72%. Dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia tentunya akan memberi harapan bagi perkembangan dan kemajuan untuk meningkatkan kualitas SDM di provinsi Maluku, sehingga dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 tingkat kemiskinan di provinsi Maluku setiap tahun mengalami penurunan, walau menurun provinsi Maluku masih belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan selama lima tahun oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta kerjasama YASTRA dengan Direct Aid Program (DAP) dapat dikatakan belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan. Dari permasalahan yang ada, diperlukan penelitian lebih lanjut di provinsi Maluku

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan diseluruh Kabupaten/Kota dan bermanfaat sebagai acuan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar lebih memperhatikan kondisi pemerataan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan di provinsi Maluku. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku menjadi masalah yang akan diteliti, dimana diperlukan adanya analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada, maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Maluku?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku.

2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku.

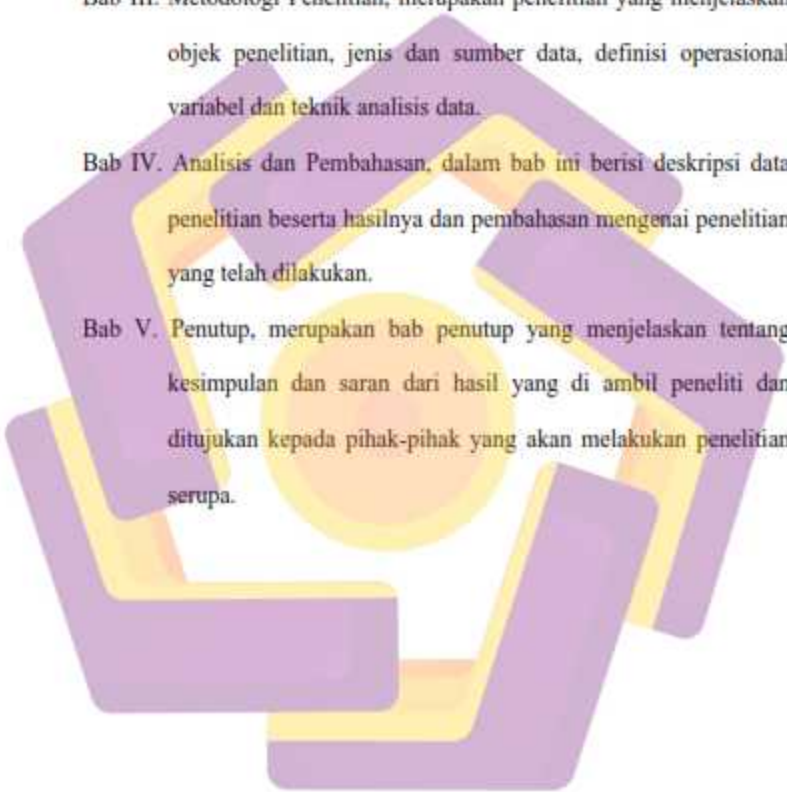
1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan, khususnya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah, selain itu juga sebagai syarat menyelesaikan masa studi S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Amikom Yogyakarta.
2. Bagi akademisi, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, IPM dan kemiskinan.
3. Bagi pembaca, sebagai bahan informasi dan gambaran seberapa besarnya pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan kontribusi kualitas sumber daya manusia terhadap masalah kemiskinan khususnya di Provinsi Maluku.
4. Bagi pemerintah, diharapkan sebagai bahan referensi ataupun pertimbangan untuk pemerintah dalam menentukan kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM dalam menghadapi masalah kemiskinan di Provinsi Maluku.

1.5. Sistematika Bab

Sistematika bab dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang disusun sebagai berikut:

- 
- Bab I. Pendahuluan, bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika bab.
- Bab II. Tinjauan Pustaka, menguraikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.
- Bab III. Metodologi Penelitian, merupakan penelitian yang menjelaskan objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.
- Bab IV. Analisis dan Pembahasan, dalam bab ini berisi deskripsi data penelitian beserta hasilnya dan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan.
- Bab V. Penutup, merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil yang di ambil peneliti dan ditujukan kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian serupa.